

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Fokus penelitian ini mengkaji atau membahas tentang kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 di Kabupaten Musi Banyuwasin dalam menjalankan fungsi legislasi yang mewakili kepentingan perempuan dan aspirasi masyarakat. Secara spesifik penelitian ini akan melihat bagaimana kinerja anggota DPRD perempuan menjalankan fungsinya sebagai legislatif. Sedangkan subjek yang diteliti ialah seluruh anggota legislatif perempuan yang di DPRD Musi Banyuwasin.

Permasalahan kinerja legislasi DPRD yang tidak baik merupakan permasalahan yang harus diatasi di semua daerah. Pemecahan masalah tersebut akan diikuti dengan dampak positif yang diterima oleh masyarakat daerah, termasuk di Kabupaten Musi Banyuwasin, dimana DPRD Kabupaten Musi Banyuwasin juga menjalankan fungsi legislasi. Data diolah dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anggota DPRD serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Musi Banyuwasin. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sekretariat DPRD dan Tokoh Masyarakat.

Objek dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuwasin dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ini merupakan salah satu unsur pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi yang mewakili kepentingan perempuan dan aspirasi masyarakat. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Responsivitas, Responibilitas dan Akuntabilitas sebagai variabel Independen.<sup>1</sup> Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah kinerja DPRD Kabupaten Musi Banyuwasin. Penelitian ini

---

<sup>1</sup> Ratminto Dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.175

menarik untuk diteliti, karena belum ada penelitian yang membahas mengenai kinerja politisi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014-2019.

Alasan kenapa perempuan itu penting harus dipahami anggota dewan, yaitu ketiadaan perspektif gender akan melahirkan perancangan anggaran yang tidak adil karena tidak mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan realistis kaum perempuan. Padahal perempuanlah yang menjadi korban rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen.

Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan konstruksi dan tradisi yang berlaku di dalam masyarakat. Faktor internal juga di sebut dengan nurture yaitu aspek sosial budaya, perempuan terbentuk/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki, dan perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga sikap alam yang melekat pada seseorang perempuan seperti : reproduksi, pemelihara rumah tangga, dan pengasuh serta pendidik terhadap anak-anaknya.<sup>2</sup>

Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan lemahnya kebijakan-kebijakan yang di ambil terutama untuk kaum perempuan. Hal ini yang mematahkan gairah kaum perempuan untuk berpolitik dan bahkan sering terdengar bahwa anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini di sebabkan karena perempuan belum mampu dalam melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga dan juga beban kerja yang belum bisa di ikuti secara penuh oleh anggota legislatif perempuan dan juga karena sikap dan mental yang lemah dan posisinya telah di marginalkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hardjito Notopuro, *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Di Indonesia*,(jakarta: ghalia indonesia,1983),h.45

<sup>3</sup> Aziz Asmaeny,*Dilemah Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen*,h.115

Dalam buku Mahsun juga menyatakan bahwa keberhasilan suatu kinerja dapat diketahui atau dapat diukur jika memiliki tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, persoalan keterlibatan perempuan di dalam pemilu tidak hanya pada permasalahan internal parpol juga persoalan di luar parpol yang meliputi situasi dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Faktor-faktor politik adalah kurangnya dukungan parpol terhadap perempuan. Secara lebih spesifik, sistem politik dan partai-partai politik Indonesia dinilai sangat tidak peka gender.<sup>4</sup>

Hal ini dikarenakan struktur politik Indonesia yang dibangun di atas jaringan eksklusif, yang di dominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun didominasi oleh laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam pemilihan pemimpin parpol sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memosisikan diri sebagai kandidat yang pantas. Kurangnya peran serta perempuan dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis dan psikologis yang fundamental.<sup>5</sup>

Bila kita membahas mengenai kinerja DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, yang harus lakukan adalah menentukan setandar keberhasilan dan standar kegagalan terlebih dahulu sehingga dengan adanya standar tersebut kita dapat mengukur apakah kinerja anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin baik atau tidak, untuk itu disini penulis akan membuat standar ukuran tersebut. Kemudian dari tabel yang ada tersebut dapat dilihat bahwa untuk menentukan hasil dari penelitian, apakah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2014-2019 sudah terlaksana dengan sangat baik atau pun tidak adalah

---

<sup>4</sup> Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama,( Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2006), h.26

<sup>5</sup> Nina Andriana, dkk., *Perempuan, Partai Politik, Dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Di Tingkat Lokal*,(Jakarta, Pt. Gading Inti Prima (Anggota Ikapi),h.8

dengan melihat jumlah tanggapan dari responden yang paling banyak. Selain itu pendapat responden bukan lah satu-satunya sumber atau informasi dalam menentukan kinerja DPRD Kabupaten Musi Banyuasin tetapi ada beberapa hal yang juga perlu untuk diperhatikan dan ditelaah seperti data yang bersangkutan dengan permasalahan dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan.

Dalam organisasi publik, masih sulit untuk menentukan kriteria kinerja yang sesuai. Bila ditinjau dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik, maka kinerja organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan dan misinya dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan publik tersebut. Namun berdasarkan atas pemahaman terhadap tujuan dan misi organisasi, dalam Dwiyanto lebih lanjut mengemukakan ada lima indikator untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu: produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Mirip dengan pendapat tersebut Lenvine mengusulkan tiga konsep untuk menilai kinerja organisasi publik, yaitu :responsivenees (daya tanggap), responsibility (tanggung jawab) dan accountability (pertanggungj jawaban).<sup>6</sup>

Terdapat perbedaan antara Indikator kinerja (performance indicators) dengan pengukuran kinerja (performance measure), karena Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif meskipun dua hal tersebut merupakan kriteria pengukuran kinerja . Hal ini menegaskan bahwa indikator kinerja dapat dianalisa secara kualitatif tanpa menghilangkan setiap faktor yang mempengaruhinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Artikel Dalam Seminar Sehari : *Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan Dan Penerapannya*, Fisipol Ugm, Yogyakarta. 1995

<sup>7</sup> Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama,( Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2006), h.26

Lembaga perwakilan memiliki peran sentral untuk secara optimal mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat atau paling tidak memperjuangkan aspirasi rakyatnya (konstituen). Dalam konteks ini, perlu tercipta kedekatan hubungan antar konstituen, baik dalam arti pemilih maupun dalam arti penduduk wilayah yang diwakili, dengan wakil-wakilnya di DPRD. Dalam lain perkataan, apa yang dilakukan DPRD semestinya dalam rangka menuju apa yang menjadi harapan masyarakat dan tentu saja kesemuanya itu harus mampu dipertanggungjawabkan pada rakyat (accountable).<sup>8</sup>

Kinerja DPRD dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan reses. Kegiatan reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka jaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing. Bertujuan untuk meyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, untuk menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat mengenai kinerja anggota dewan dapat dilihat dari data aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD dalam hal kinerja dan hasil perda. Disinilah anggota dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjelaskannya kepada masyarakat sebagai konstituennya mengenai hasil-hasil kebijakan yang di keluarkan DPRD.

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat diselenggarakan dengan baik ketika wakil rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Sehingga

---

<sup>8</sup> Primadya Rosa Ayu Anggraeny, ” *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016

adanya hubungan timbal balik bagi masyarakat maupun anggota Dewan. Terkait dengan Upaya anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di Musi Banyuasin, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban dan sudah hal yang mutlak bagi anggota legislatif di DPRD sebagai wakil dari rakyat, seperti halnya anggota legislatif perempuan dimana adanya perwakilan perempuan di DPRD dapat memberikan warna baru dalam lembaga legislatif yang menjadi tumpuan harapan masyarakat agar apa yang menjadi masukan aspirasi masyarakat dapat direspon dengan baik sehingga apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mampu tersampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sehingga mampu untuk direalisasikan baik dalam bentuk peraturan ataupun program untuk kesejahteraan masyarakat. <sup>9</sup>

Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD sering kali menyampaikan secara berkelompok dan perorangan, aspirasi disampaikan secara lisan maupun secara tulisan, dominan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan dilakukan secara berkelompok. Anggota legislatif perempuan sebagai wakil dari rakyat harus mampu dalam merespon aspirasi masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi yang ada di masyarakat dapat terdengarkan bukan hanya didengarkan saja tapi mampu untuk ditindak lanjuti baik disampaikan kepemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, disini dibutuhkan peran anggota legislatif sebagai wakil dari rakyat sebagai penyambung aspirasi masyarakat. <sup>10</sup>

Dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif DPRD Musi Banyuasin dalam hal ini anggota legislatif perempuan biasa melakukan pencatatan terhadap aspirasi yang disampaikan

---

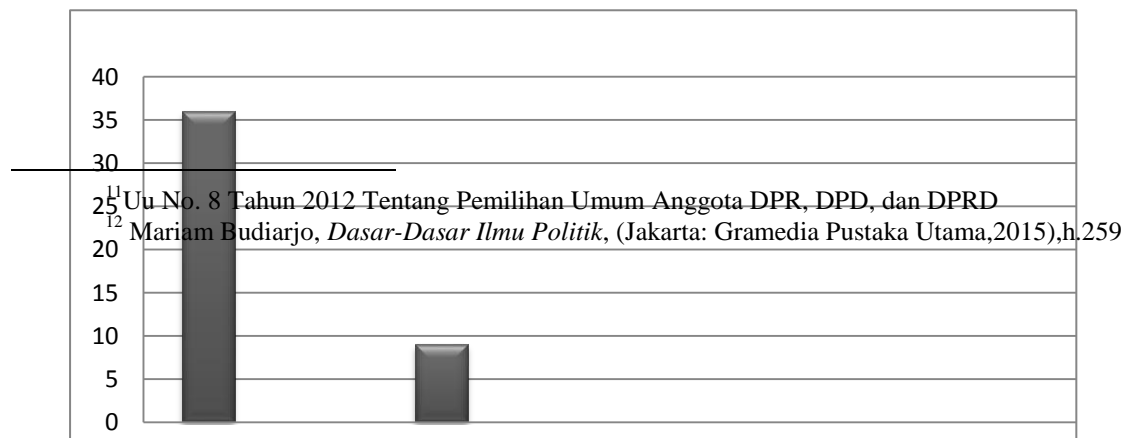
<sup>9</sup> A. Rizal “ *Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Studi Pada DPRD Kota Makassar* ”, (Universitas Negeri Makassar)

<sup>10</sup> Ibid.

masyarakat, serta membuka ruang diskusi dengan masyarakat semua masukan aspirasi akan dikumpulkan untuk dibawa ke setiap komisi masing-masing.

Pada Awalnya Untuk lembaga legislatif telah dibuat UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD<sup>11</sup> yang di dalamnya memuat tentang kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Undang-undang tersebut kemudian di sempurnakan lagi padatahun 2008 menjadi UU No. 10 tahun 2008 pasal memuat kuota 30% bagi calon anggota legislatif perempuan. Penempatan kuota tersebut tidak serta merta membawa perubahan yang di inginkan, kuota 30% hanya merupakan sebuah stimulasi di DPRD Musi Banyuasin baru mencapai 20 % dapat di lihat dari tabel 1 karena kenyataan partisipasi perempuan di bidang politik, dan secara khusus pada minat untuk menjadi anggota legislatif masih sangat kurang.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Anggota DPRD Musi Banyuasin Menurut Jenis Kelamin**  
**Periode 2014-2019**



Sumber	No	Uraian	Tahun 2014 -2019	persentase
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 2014-2019	1	Laki – laki	36	80 %
	2	Perempuan	9	20 %
		Jumlah	45	100%

Dalam konteks ini anggota legislatif perempuan ketika sudah terjun dalam dunia politik maka dianggap sebagai penampung apresiasi semua masyarakat secara umum, artinya tidak hanya bertanggungjawab pada masalah perempuan saja tetapi masalah masyarakat secara keseluruhan. Dalam penelitian ini kesatuan atau hubungan anggota legislatif perempuan dengan keluarga menjadi relevan untuk dijadikan sebagai dasar dalam penelaahan kinerja mereka di dewan. perempuan dalam sebuah keluarga atau rumah tangga mereka bisa dianggap sebagai anak gadis, istri, ibu, ibu rumah tangga, pencari nafkah tambahan, ataupun sebagai pencari nafkah pokok. Dalam masyarakat Indonesia perempuan dikatakan hebat jika berhasil dalam rumah tangga, menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarga. Artinya pandangan ini menjadi tantangan bagi anggota perempuan untuk berkarir dalam politik.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*,( Jakarta: Rajawali,1983), h.5



Berdasarkan pada hal-hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Periode Tahun 2014-2019 di Kabupaten Musi Banyuasin (belum memenuhi kuota 30%) sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana Kinerja Anggota DPRD Perempuan di Musi Banyuasin dalam merespon kepentingan perempuan dan apa saja hambatan yang di alami anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan fokus penelitian ini akan melihat bagaimana peran, posisi, dan kinerja anggota legislatif perempuan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Anggota DPRD Perempuan di Musi Banyuasin dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu Legislasi, Pengawasan dan Anggaran di DPRD Musi Banyuasin ?
2. Apa saja hambatan yang di alami anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan ini tidak terlalu meluas dan melebar, maka penulis memberikan batasan yang jelas yakni, pada kinerja anggota DPRD periode 2014-2019 di kabupaten Musi Banyuasin. Fokus penelitian ini di buat agar penelitian tidak menyimpang dari apa yang ingin di teliti, sehingga maksud dan tujuan yang ingin di sampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran di DPRD Musi Banyuasin.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya.

### **E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik itu untuk peneliti itu sendiri dan terlebih lagi untuk masyarakat luas. Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang akan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan juga lembaga perwakilan rakyat (DPRD), diantaranya adalah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah mengenai penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Memberikan wawasan mengenai kinerja politisi perempuan di DPRD, dan Sebagai salah satu bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai kinerja politisi perempuan di DPRD<sup>14</sup>.

Untuk itu menurut penulis manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kajian khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan, bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan fungsinya.

---

<sup>14</sup> Yuliasuti Wulandari, "*Kinerja Politisi Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Tahun 2014-2016*", Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan informasi, dan sebagai bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Musi Banyuasin dalam menjalankan fungsinya .

## F. Tinjauan pustaka

Penulis mengkaji tentang kinerja perempuan dan fokus penelitian akan melihat bagaimana peran, posisi dan kinerja anggota legislatif perempuan dalam fungsi legislasi di DPRD Musi Banyuasin belum ada yang meneliti. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian, menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis belum pernah dibahas atau diteliti. Kemudian beberapa kajian pustaka yang penulis ambil dalam penelitian ini dapat dari literatur yang berupa buku cetak artikel dan skripsi. Dari literatur yang ditemukan ada beberapa skripsi yang memiliki cakupan bahasan hampir serupa dengan skripsi ini. Misalnya:

*Pertama*, Mukhamad Murdiono tahun 2011 “ *Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 Di kota Yogyakarta*”. Universitas Negeri Yogyakarta penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum legislatif di kota Yogyakarta dan menentukan apakah kebijakan kuota bagi perempuan dalam pemilihan umum 2009 telah meningkatkan kesetaraan gender.<sup>15</sup>

Dari penelitian di atas persamaan penelitian ini adalah fokusnya sama-sama tentang keterwakilan perempuan di parlemen dengan menggunakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan perbedaannya terletak pada kajian ini bersifat analisis induktif dan

---

<sup>15</sup> Mukhamad Murdiono , “ *Perempuan Dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di kota Yogyakarta*”. (Universitas Negeri Yogyakarta,2011)

fokus penelitiannya tentang peraturan undang-undang no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum yang memuat keterwakilan perempuan 30% bagi kaum perempuan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kinerja anggota legislatif perempuan yang sudah menduduki kursi parlemen.

*Kedua*, penelitian yang diteliti oleh Eka Martianingsi Sri Rahayu yang berjudul ” *Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pernerdayaan Politik Pada Masyarakat Wonogiri( Studi Kasus pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014 peneliti ini mengkaji tentang bentuk bentuk aktivitas yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik, kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dan solusi mengatasi kendala dalam pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat wonogiri. <sup>16</sup>

Dari penelitian di atas, persamaan dengan penelitian ini adalah sama –sama pendekatan kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan. Dan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya di penelitian ini fokus penelitiannya lebih kepada upaya dan peran dari anggota legislatif perempuan dalam upaya pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan pada masyarakat wonogiri. Sedangkan penelitian ini memfokuskan bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan terkait dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Andri Pratama 2015 “*Strategi dan Taktik Pemenangan Calon Legislatif Studi Tentang Perempuan Calek dari Partai Demokrat pada dalam Pemilu 2014 Musi Banyuasin*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan

---

<sup>16</sup> Eka Martianingsi Sri Rahayu, ” *Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pernerdayaan Politik Pada Masyarakat Wonogiri( Studi Kasus Pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri)*. (Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014)

taktik calon legislatif perempuan dalam memenangkan pilkada di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Musi Banyuasin. Dan Kendala yang Dihadapi dalam Memenangkan Calon Legislatif Perempuan dari Partai Demokrat pada Pemilu Tahun 2014 di Kecamatan Musi Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin.<sup>17</sup>

*Empat*, Primadya Rosa Ayu Anggraeny Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti “*Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)*”. tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja anggota DPRD perempuan periode tahun 2014-2019 di Kota Metro ditinjau dari aspek legislasi. Hasil penelitian ini adalah DPRD perempuan Kota Metro periode tahun 2014-2019 sudah melaksanakan kerjanya dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil triangulasi yang telah dilakukan, dengan membandingkan ketiga pihak (pro, kontra, dan netral) serta menyelaraskan hasilnya dengan dokumentasi dan observasi ketika penelitian. Anggota DPRD perempuan membuat agenda perubahan yang melibatkan perempuan baik secara pragmatis ataupun substantif.<sup>18</sup>

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tesis : *Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah (Studi pada DPRD Propinsi Jawa Tengah)*. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa DPRD Propinsi Jawa Tengah pada waktu itu belum menunjukkan suatu kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari indikator fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Faktor

---

<sup>17</sup> Andri Pratama, “*Strategi Dan Taktik Pemenangan Calon Legislatif Studi Tentang Perempuan Calek Dari Partai Demokrat Pada Dalam Pemilu 2014 Musi Banyuasin*”,(Jurusan Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah,2015)

<sup>18</sup> Primadya Rosa Ayu Anggraeny,” *Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Ditinjau Dari Aspek Legislasi Dalam Proses Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro)*,(Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung,2016)

yang mempengaruhi rendahnya kinerja tersebut adalah faktor pengalaman dalam berpolitik dan faktor validasi serta rendahnya data/informasi yang ada. Peningkatan kinerja DPRD Propinsi Jawa Tengah perlu dilakukan dengan menempatkan kader-kader terbaik yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif. Pembentukan pusat pelayanan terpadu sehingga memungkinkan Anggota dewan mudah mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas serta pembentukan Badan Kehormatan untuk menindak anggota dewan yang melakukan kegiatan diluar tugasnya sebagai anggota dewan. Anggota dewan harus menjadi contoh dan memperjuangkan aspirasi masyarakat luas yang memilihnya, sehingga daerah yang diwakilinya akan lebih maju. Hal ini dapat diwujudkan melalui kinerja anggota dewan yang berupaya mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat luas terutama masyarakat pemilihnya.<sup>19</sup>

Dari tinjauan pustaka di atas secara garis besar bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang “ kinerja perempuan parlemen” dan fokus penelitiannya tentang kinerja anggota legislatif perempuan dalam fungsi legislasinya di DPRD kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan guna tinjauan pustaka di atas untuk menentukan posisi tulisan di mana dengan penelitian yang sudah ada, konteks pembahasan yang di lakukan oleh para penulis tersebut di atas mempunyai cakupan yang luas mengenai representasi perempuan dan fokus penelitian akan melihat bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di DPRD kabupaten Musi Banyuasin.

## **G. Kerangka Teori**

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsi dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan, serta untuk memberikan jawaban

---

<sup>19</sup> Siti Chomzah , “Analisa Kinerja DPRD Dalam Era Otonomi Daerah Studi Pada DPRD Propinsi Jawa Tengah”, (Pascasarjana Ugm,2002 )

secara mendalam terhadap permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperlukan landasan teori. Beberapa teori yang dianggap relevan di gunakan sebagai alat ukur untuk mencari jawaban dari permasalahan. Ada pun teori yang di gunakan dalam skripsi ini adalah teori representasi, dan kinerja lembaga DPRD.

### **1. Teori Representasi**

Dalam representasi biasanya ada dua katagori yang di bedakan. Katagori pertama perwakilan politik ( *Representation polical*) dan perwakilan fungsional (*funcitional representation* ). Katagori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai trustee, dan perannya sebagai pengemban” mandat” perwakilan politik (*political representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau sekelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sekarang ini anggota legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini di namakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).<sup>20</sup>

Menurut Hanna Fenichel Pitkin (1969 ) sebagaimana yang dikutip oleh Parwati. Mengelompokan perwakilan kedalam empat katagori yaitu : *pertama* perwakilan formal ( *formalistic representation* ) di dalam kategori ini, perwakilan dipahami di dalam dua dimensi yaitu : otorisasi dan akuntabilitas, dimensi otoritas yaitu ketika wakil melakukan sesuatu di luar otoritasnya, dia tidak lagi menjalaankan fungsi perwakilannya. Dimensi akuntabilitas yaitu adanya pertanggung jawaban dari para wakil tentang apayang telah di kerjakan. *Kedua*, perwakilan desriptif (*desriptive representation* ),yaitu adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang di wakili ( *standing for*) meskipun tidak bertindak untuk yang di wakilinya. *Ketiga*, perwakilan simbolik ( *symbolic representation*), di mana para wakil merupakan simbolik perwakilan darikelompok atau bangsa yang di wakili. *Keempat*, perwakilan

---

<sup>20</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h, 317

substantif (*substantive representation*) di mana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin atau keinginan dan kehendak orang-orang yang di wakilinya atau publik (*acting in the best interest of the public*).<sup>21</sup>

## **2. Kinerja lembaga DPRD**

### **a. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Kinerja sangat di pengaruhi oleh sikap dan karakternya dalam menyelesaikan pekerjaannya yang di dasari oleh sebuah orientasi. Kinerja juga mencangkup tiga elemen antara lain keterampilan, upaya dan sikap keadaan eksternal. Dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi dan merupakan suatu tingkat sejauh mana proses kegiatan organisasi itu memberikan hasil dan mencapai tujuannya.<sup>22</sup>

### **b. Pengukuran Kinerja**

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penelitian tersebut dapat di bedakan dalam aspek penilaian, aspek – aspek yang di nilai untuk pimpinan atau manager dalam suatu organisasi ialah : tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, atau inisiatif dan kepemimpinan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi harus di ketahui ukuran keberhasilan untuk mendapat menilai kinerja tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, ( Jakarta: Kencana Grup,2009) h.40

<sup>22</sup> A.A Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sdm*, ( Bandung : Refika Aditama, 2007), h.122

<sup>23</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*, ( Bandung : Alfabeta, 2011),h.64



Menurut Lenvinne (1990) dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih<sup>24</sup>, keberhasilan kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari pendapat dan penjelasan dari para ahli di atas, mengenai bagaimana mengukur kinerja, maka penelitian ini menggunakan ukuran kinerja organisasi untuk mengukur sejauh mana kinerja politisi perempuan di DPRD, yang tentu saja dalam penentuan ukuran tersebut disesuaikan dengan tujuan dan visi misi organisasi yang berhubungan pada: responsivitas, akuntabilitas, dan efektivitas.<sup>25</sup> Untuk memperjelas penggunaan indikator tersebut, berikut dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan konsep dari masing-masing indikator adalah:

#### **a. Responsivitas**

Tingkat responsivitas yang akan diteliti adalah kemampuan politisi perempuan dalam mengenali kebutuhan masyarakat, merespon persoalan yang muncul, dan memahami kemauan masyarakat untuk kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama berkaitan dengan kaum perempuan. Tingkat responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengangkat derajat kaum perempuan sehingga tercapainya kesetaraan gender, kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri.<sup>26</sup>

#### **b. Akuntabilitas**

---

<sup>24</sup> Ratminto dan Atik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.175

<sup>25</sup> Ibid, h. 174

<sup>26</sup> Irfan Fahmi, *Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabate, 2011),h.67

Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk mengukur kinerja politisi perempuan untuk melihat seberapa besar kegiatan pelaksanaan peran dan fungsi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik (kebijakan). Konsep akuntabilitas publik dapat di gunakan untuk melihat seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Karena itu dilihat dari dimensi ini kinerja organisasi publik tidak bisa hanya di lihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik, pemerintah, seperti pencapaian target.<sup>27</sup>

Dari penjelasan di atas maka dijelaskan bahwa kinerja di anggap berhasil apabila memiliki akuntabilitas yang baik dan apabila organisasi tersebut melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian ini studi kasus DPRD jadi dapat di simpulkan bahwa kinerja DPRD salah satunya di nilai dari akuntabilitas sehingga melihat sebesar pelaksanaan kegiatan dan tugas dari fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik nantinya dilaksanakan pihak eksekutif.

### **c. Efektivitas**

Efektivitas disini akan diukur dari apakah dengan adanya politisi perempuan di lembaga perwakilan dapat sebagai penyambung aspirasi masyarakat daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi yang diembannya. Oleh karena itu, DPRD dituntut memiliki kemampuan, menampung dan merumuskan kepentingan rakyat, agregasi berbagai kepentingan yang akan disalurkan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan memiliki dampak yang berbeda antara warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. Kebijakan

---

<sup>27</sup> Affan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), h.7

yang berhubungan dengan perempuan tersebut seringkali dianggap sudah pasti terpenuhi oleh para anggota parlemen laki-laki. Padahal di lain pihak, kepentingan khusus perempuan tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan kebijakan politik yang ada.

Melihat beberapa penjelasan diatas, sangatlah penting untuk melakukan penelitian terhadap kinerja yang dimiliki oleh anggota perempuan DPRD Musi Banyuasin dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>28</sup> Penulis juga akan melakukan analisis kinerja pada anggota DPRD perempuan di Musi Banyuasin dengan menggunakan indikator kinerja dari teori responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas dengan kaitannya mengenai tahapan proses legislasi dapat terbentuk, dari pengambilan aspirasi, penyaluran hingga pertanggungjawaban kepada rakyat yang kemudian aspirasi itu di implementasikan ke dalam suatu kebijakan daerah ataupun tindakan yang berorientasi fisik yang nantinya apakah dapat mementingkan kepentingan kaum perempuan atau tidak di dalamnya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.<sup>29</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan dengan melihat dari aspek pelaksanaan legislasinya. Di mana data dikumpulkan serta diolah dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini. Untuk memproleh suatu hasil penelitian yang

---

<sup>28</sup> Agus, Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*, Makalah Dalam Seminar Sehari : *Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan Dan Penerapannya*, Fisipol Ugm, Yogyakarta. 1995

<sup>29</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*(.Jakarta: Alfabeta,2011.),h..2

komprehensif dan valid secara ilmiah dalam sebuah penulisan karya ilmiah, tentu saja diperlukan metode sebagai sarana untuk memperoleh akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan menelaah data yang relevan dengan topik kajian kemudian dianalisis.

## **2. Fokus Penelitian**

fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti yang masih bersifat umum. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Mengingat adanya dinamika perempuan dan politik di Musi Banyuasin<sup>30</sup>. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti akan memfokuskan tentang bagaimana kinerja anggota DPRD perempuan ditinjau dari aspek fungsinya.

## **3. Lokasi Penelitian**

Adapun dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan, lokasi dari penelitian ialah DPRD kabupaten Musi Banyuasin. alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah :

- a. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada observasi awal mengenai kuota perempuan 30% untuk menduduki kursi di parlemen belum memenuhi sehingga peneliti tertarik untuk meneliti keterwakilan perempuan parlemen di DPRD Musi Banyuasin.
- b. Dikarenakan belum adanya penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian di atas khususnya di DPRD Musi Banyuasin.

---

<sup>30</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.(Jakarta: Alfabeta,2011.) h.209

- c. Dan terjangkaunya lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga, dana maupun segi efisiensi waktu.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan seluruh anggota legislatif perempuan yang di DPRD Musi Banyuasin pada lokasi penelitian yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang isinya menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari DPRD Musi Banyuasin. Serta rujukan buku, koran, dan internet yang dapat menjadi referensi bagi penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan<sup>31</sup>. Untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*(Jakarta: Alfabeta,2011.)h..224

### **a. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung. Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-data secara maksimal. Dan penulis terlebih dahulu menentukan beberapa informan kunci sebagai data. Informan kunci yaitu orang yang di angap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan di gali, dan informan kunci yaitu anggota legislatif perempuan di DPRD Musi Banyuasin dan masyarakat .

### **b. Observasi**

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Dalam Sugiyono, observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan<sup>32</sup>. Penulis dalam penelitian ini mengamati secara langsung bagaimana kinerja anggota legislatif perempuan DPRD Musi Banyuasin dalam menjalakan fungsinya.

### **c. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) dilakukan peneliti di DPRD Musi Banyuasin . Menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen

---

<sup>32</sup>*Ibid.h166*

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>33</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori, dan satu uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan data. Terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu, pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.<sup>34</sup>

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat di artikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. penelitian ini mencatat hasil wawancara dan hasil observasi terkait rumusan masalah yang di teliti di DPRD Musi Banyuasin.

### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat di tarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang di peroleh dai hasil wawancara dan observasi untuk di masukkan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa.

Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan mengolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas. Dalam penelitian ini data yang

---

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h.206

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Jakarta: Alfabeta, 2011.) h..231

di reduksi adalah pada temuan di lapangan yaitu hasil wawancara, dan hasil observasi langsung, dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokkan dengan rumusan masalah.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca. Data penulis berasal dari observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan cara memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

#### d. Penarikan kesimpulan

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan kategori berbeda, maka penelitian pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil deskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.



## **I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Gambaran lebih jelas tentang isi dari keseluruhan skripsi disajikan dalam struktur organisasi skripsi berikut dengan pembahasannya. Struktur organisasi skripsi tersebut disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menguraikan Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data dan sistematika pembahasan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang bermaksud ialah DPRD Musi Banyuasin

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKILAN PEREMPUAN**

Bab ini berisi tentang tinjauan tentang perwakilan politik perempuan, pentingnya politik perempuan, hambatan politik perempuan dan faktor penyebab minimnya politik perempuan.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, pembahasan penelitian sesuai dengan teori yang sudah dikemukakan di Bab II, Analisa data dan hasil temuan dalam bab ini dikemukakan yang berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji tentang kinerja perempuan partai politik Islam di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran hasil penelitian.